

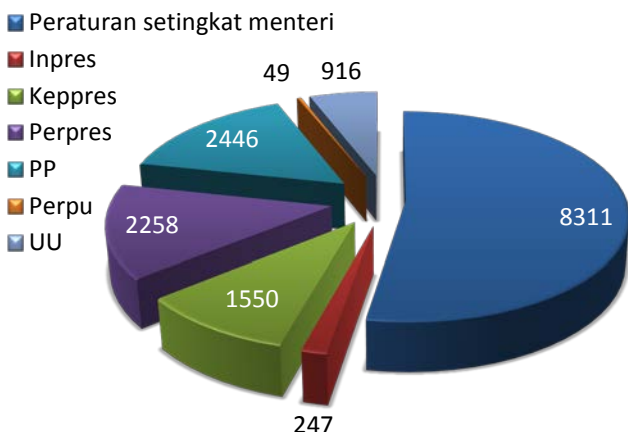
## Strategi Penataan Kebijakan Nasional

### Executive Summary

Kebijakan publik di Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tidak pro publik maupun pro bisnis, jika kondisi ini dibiarkan akan berimbas pada capaian tujuan pembangunan. Salah satu prioritas nasional menekankan pentingnya deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan berbagai kebijakan yang ada. Strategi untuk melakukan deregulasi ini dapat dilakukan dengan Sistem Quota. Strategi ini juga harus dilengkapi dengan upaya membenahi proses perumusan kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang baik. Proses perumusan kebijakan ini membutuhkan sebuah pedoman yang berlaku secara nasional yang disebut Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).

### Latar Belakang

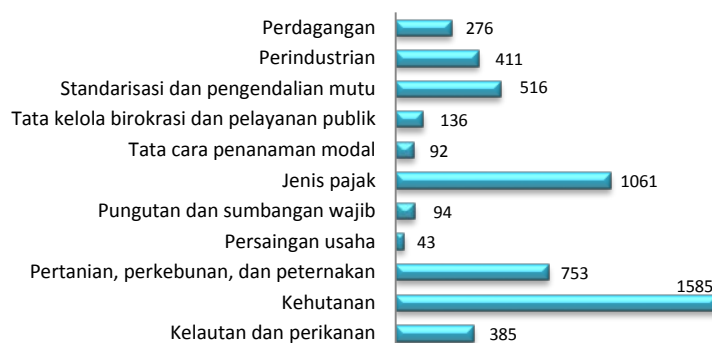
Tata kelola kebijakan yang baik telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan dalam era reformasi birokrasi saat ini. Tuntutan ini cukup rasional mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik di Pusat maupun Daerah, untuk menyusun berbagai regulasi seperti UU hingga Perda. Gambaran kualitas regulasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga survey nasional maupun internasional, menunjukkan kualitas regulasi di Indonesia masih rendah.



Gambar 1 : Regulasi di tingkat Pusat yang terbit tahun 2000-2015

Sumber: Data Sekretariat Negara dan *Hukum Online* dalam Bappenas (2015)

Permasalahan kebijakan di Indonesia ditandai dengan jumlah regulasi di Indonesia yang sangat banyak. Selain permasalahan terkait jumlah, kualitas kebijakan juga masih perlu dipertanyakan. Beberapa indikasinya antara lain: banyak kebijakan (regulasi) tidak berpihak pada kepentingan publik, banyak Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, banyak program pembangunan yang memicu kontroversi dari para pemangku kepentingan, dan yang lebih ironis kebijakan berusia sangat pendek (Dwiyanto, 2016).



Gambar 2 : Kategori bidang regulasi  
Sumber: *Hukum Online* dalam Bappenas (2015)

Kondisi regulasi tersebut mengganggu kecepatan Pemerintah untuk bertindak dan juga menghambat laju investasi dalam negeri (tidak mendorong pertumbuhan ekonomi). Salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah deregulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan aturan yang jumlahnya terlalu banyak.

### A. Rekomendasi Jangka Pendek

- Deregulasi di Indonesia perlu diterapkan melalui sistem quota bagi seluruh K/L/Pemda untuk mengurangi jumlah peraturan perundangan yang dimiliki dengan tolok ukur harapan Presiden untuk mengurangi jumlah regulasi mencapai 50%, K/L/Pemda harus mengurangi jumlah regulasinya antara 25-50%.
- Penetapan kuota dalam kisaran 25-50% dilakukan dengan menggunakan Analisis *Input* dan *Outcome* Kebijakan, dengan mekanisme:
  - K/L/Pemda membandingkan antara *input* (semua *effort* yang dilakukan) dan *outcome* (manfaat/dampak).
  - Hasil pemetaan tersebut dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut:

(-) Outcome (+)	I Input (rendah) Outcome (tinggi) <b>(dipertahankan)</b>	II Input dan Outcome (tinggi) <b>(dianalisis lebih lanjut)</b>
	IV Input dan Outcome (rendah) <b>(dihapuskan)</b>	III Input (tinggi) Outcome (rendah) <b>(dihapuskan)</b>
	(-) Input (+)	

Tabel 1 : Kuadran Analisis *Input Outcome* Regulasi

Keterangan:

- Kuadran I: Kebijakan dipertahankan karena memiliki *input* yang rendah dan *outcome* yang tinggi.
  - Kuadran II: Kebijakan perlu dianalisis lebih lanjut karena memiliki *input* dan *outcome* yang tinggi.
  - Kuadran III: Kebijakan dihapuskan karena memiliki *input* yang tinggi dan *outcome* yang rendah.
  - Kuadran IV: Kebijakan dihapuskan karena memiliki *input* dan *outcome* yang rendah.
- c. Publikasi terhadap hasil pemetaan yang berupa daftar regulasi yang dihapuskan dan regulasi yang dipertahankan.

Pada *framework* di atas terlihat dua tahapan *assesment* yang harus dilakukan, yaitu :

- a) *Assesment* proses perencanaan kebijakan. Penilaian dalam tahap ini dilakukan *review* terhadap '*agenda setting*' dan '*formulasi kebijakan*'. Tujuan *assesment* ini adalah memastikan bahwa *policy problem* merupakan isu publik yang '*layak*' menjadi sebuah kebijakan dan disusun melalui proses formulasi kebijakan yang ideal.
- b) *Assesment* proses pelaksanaan kebijakan. Penilaian dalam tahap ini dilakukan *review* terhadap '*implementasi kebijakan*' dan '*evaluasi kebijakan*'. Tujuan *assesment* ini adalah memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat diimplementasikan dengan tepat dan memberikan dampak yang diharapkan.

2. Hasil penilaian dengan menggunakan IKK berupa strategi peningkatan kualitas kebijakan di Indonesia.
3. Implementasi strategi peningkatan kualitas kebijakan.
4. Peningkatan kualitas kebijakan di Indonesia.

## Kesimpulan

Deregulasi dan peningkatan kualitas proses perumusan kebijakan membutuhkan sebuah keputusan dan keberanian untuk segera dilaksanakan. Alternatif jangka pendek dalam *policy brief* ini mengindikasikan peluang untuk keberhasilan upaya deregulasi dan peningkatan kualitas proses perumusan kebijakan publik.

Untuk menjamin kualitas kebijakan selanjutnya, strategi jangka pendek harus segera ditindaklanjuti dengan strategi jangka panjang yang bertujuan untuk memperbaiki proses perumusan kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang pro publik dan *business friendly* (*ease of doing business*).

## Bibliografi:

- Sadiawati, Diani, dkk. 2015. *Strategi Nasional Reformasi Regulasi : Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. ([http://dapp.bappenas.go.id/upload/file\\_article/document/\(buku-strategi-nasional-reformasi-regulasi\)-Buku%20Reformasi%20Regulasi%20-%20FINAL%20FIX\(1\).pdf](http://dapp.bappenas.go.id/upload/file_article/document/(buku-strategi-nasional-reformasi-regulasi)-Buku%20Reformasi%20Regulasi%20-%20FINAL%20FIX(1).pdf))
- The World Bank Group. 2015. *Worldwide Governance Indicators*. (<http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators>)

## B. Rekomendasi Jangka Panjang

Proses deregulasi ini harus diikuti dengan kebijakan nasional peningkatan kualitas proses perumusan kebijakan. Langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pengembangan instrumen penilaian kualitas kebijakan publik di Indonesia (*Policy Quality Index*).

Konsep pengembangan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dapat difokuskan pada dua tahap, yaitu pada (1) proses perencanaan kebijakan (tahap *agenda setting* dan formulasi kebijakan) serta pada (2) proses pelaksanaan kebijakan (tahap implementasi dan evaluasi kebijakan). Berikut adalah *framework* IKK sebagai sebuah pedoman penilaian kualitas kebijakan.



Gambar 3 : *Framework* Indeks Kualitas Kebijakan